

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yaitu sistem pemerintahan diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, dimana negara yang menganut sistem ini ditandai dengan adanya Pemilihan Umum (Pemilu) dan sudah diselenggarakan sejak awal negara Indonesia berdiri yaitu pada tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota konstituante yang merupakan dewan yang dipilih untuk membentuk konstitusi baru bagi republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang merupakan konstitusi sebagai pengganti negara Republik Indonesia Serikat (RIS) hasil perundingan konferensi meja bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag Belanda pada tahun 1949 (Siregar, 2023), dimana pembentukan negara RIS bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara federal atau negara bagaian dengan kekuasaan tertinggi dipegang oleh kerajaan Belanda adalah sebagai upaya kolonial Belanda agar tetap dapat mempunyai pengaruh di nusantara, namun pada tahun 1950 negara bagian membentuk RIS kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui akibat demo besar-besaran rakyat menuntut untuk kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pada tahun 1955 diselenggarakan Pemilu untuk pertama kalinya sebagai penanda negara Indonesia menganut sistem demokrasi dan terus masih digunakan hingga sekarang (Bakaruddin, 2020).

Dalam berjalannya proses demokrasi di Indonesia terus mengalami perkembangan dan puncaknya terjadi pada tahun 1998 yang dikenal dengan reformasi dimana demokrasi yang berjalan masa pemerintahan Soeharto yang menganut sistem demokrasi pacasila yang merupakan sistem pemerintahan yang diarahkan oleh hikmat kebijaksanaan melalui proses permusyawaratan dan perwakilan, dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan mekanisme musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan tertinggi dan apabila musyawarah mufakat tercapai maka dilanjutkan dengan voting suara terbanyak dan hal ini sejalan yang disampaikan Prof. Mahfud MD dalam bukunya Demokrasi dan Konstitusi Indonesia juga menjelaskan hal yang sama (Rohmah, 2022).

Dengan bergulirnya reformasi pada tahun 1998 telah banyak merubah sistem tatanan negara Indonesia termasuk dalam penentuan pejabat eksekutif atau presiden dan wakil presiden yang sebelumnya yang dipilih melalui sidang MPR dan berubah pada pemilihan langsung dan pertama kali diselenggarakan pada tahun 2004 hingga 2024. Pada tahun 2004, koalisi yang telah dibangun oleh Partai Golkar pada putaran pertama pilpres yaitu dengan mendukung Wiranto-Wahid sebagai capres dan cawapres, akan tetapi pada putaran kedua pilpres itu Partai Golkar menempatkan posisi untuk mendukung Megawati-Hasyim Muzadi, dan berkompetisi dengan pasangan SBY-JK, dan yang menang pada pilpres 2004 adalah SBY-JK yang dijuluki sebagai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Kemudian, pada tahun 2009, Partai Golkar menempatkan koalisi untuk mendukung SBY-Boediono bersama

KIB Jilid II dan partai pendukungnya adalah Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PKB.

Pada tahun 2014, terjadi perubahan koalisi yang cukup dinamis dalam internal Partai Golongan Karya, dan dimana Joko Widodo menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di Republik Indonesia karena terpilih sebagai Presiden pada Pilpres 2014. Joko Widodo yang memulai karir politiknya menjadi Walikota Solo dan berlanjut menjadi Gubernur DKI Jakarta dan dicalonkan menjadi Presiden di tahun 2014 oleh partainya, yaitu PDIP dengan konsep membangun koalisi ideologi dimana pembentukan koalisi partai bukan didasarkan pada kesepakatan pembagian kursi melainkan kesepahaman ideologi, artinya tidak adanya pragmatisme untuk membagi-bagi kekuasaan dengan partai-partai politik (Suryawan Raharjo, 2023), dimana pada saat pembangunan koalisi ideologis sudah diprediksi oleh peneliti LIPI yang menilai bahwa koalisi ideologis yang disampaikan Joko Widodo tersebut hanya strategi populis untuk meyakinkan publik dalam mendapatkan dukungan elektoral (News, 2014), dengan memakai strategi tersebut Joko Widodo berhasil mendapatkan dukungan partai-partai politik diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Partai Politik Pengusung Joko Widodo Pada Pilpres Tahun 2014

No	Partai	Jumlah Kursi	Jumlah Persentase Suara
1	PDIP	109	18,95%
2	NASDEM	35	6,72%
3	PKB	47	9,04%
4	HANURA	16	5,26%
Jumlah		207	39,97%

Sumber : KPU, 2014

Dari tabel diatas terlihat dari persentase suara yang didapatkan PDIP hanya itu 18,95%, artinya PDIP selaku partai pengusung tidak dapat mecalonkan Joko Widodo secara sendiri karena syarat untuk dapat mencalonkan presiden harus mendapatkan dukungan minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilihan Umum DPR yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, artinya dengan perihal tersebut PDIP yang mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden harus berkoalisi dengan partai lain yang memiliki kursi di parlemen (Ammar Surya Sorimuda Lubis, 2023), agar memenuhi persyaratan untuk dapat mencalonkan Joko Widodo sebagai Calon Presiden, sehingga dengan jargon koalisi ideologis PDIP dan Joko Widodo dengan PKB, Nasdem dan Hanura sehingga membangun Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dapat menarik partai lain untuk bergabung dalam koalisi untuk memenuhi persyaratan Joko Widodo sebagai Calon Presiden di Tahun 2014. Pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang dengan perolehan 53,15% atau 70.997.851 suara (Lukmantoro, 2014), dan rivalnya adalah Prabowo-Hatta Rajasa dengan perolehan suara 46,85% atau 62.576.444 suara pada Pilpres 2014 dengan partai pengusung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Partai Pengusung Prabowo-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014

No	Partai	Jumlah Persentase
		Suara
1.	GERINDRA	11,81%
2.	GOLKAR	14,45%
3.	PPP	5,32%
4.	PAN	6,01%
5.	PKS	7,88%
6.	PBB	1,46%
Jumlah		46,93%

Sumber : KPU, 2014

Setelah terpilih menjadi presiden pada tahun 2014 membentuk Kabinet Indonesia Kerja (KIK) yang didukung oleh 4 partai pengusung Joko Widodo pada saat pemilihan presiden dengan tidak melibatkan partai lain yang bukan pendukung Joko Widodo pada saat pemilihan presiden diantaranya adalah Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKS, Demokrat dan PPP, sehingga di parlemen terbentuk koalisi oposisi pemerintah yang dinamakan Koalisi Merah Putih (KMP) dengan 353 kursi dan sangat mendominasi di parlemen, sehingga dengan hal tersebut menyulitkan koalisi pemerintah untuk dapat bertarung di Parlemen dalam memuluskan program-program pemerintah karena selalu kalah suara di parlemen yang berujung pada voting dimana pada masa tersebut partai koalisi pendukung pemerintah tidak mendapatkan kursi pimpinan di DPR, karena parlemen mayoritas dikuasai oleh

kubu KMP, sehingga presiden menjadi kerepotan dalam memuluskan untuk mendapatkan persetujuan program dan kebijakannya kepada DPR (Fadillah, 2017), menyadari hal tersebut presiden Joko Widodo mulai melakukan pendekatan dengan partai politik lain dan mulai mengabaikan jargon koalisi ideologis yang merupakan konsep pembangunan koalisi tanpa syarat atau bagi-bagi kursi kementerian dengan partai politik mulai ditinggalkan oleh Jokowi, dengan merangkul partai politik oposisi yang tergabung sebelumnya dalam KMP dan menambah kursi dan suara di parlemen, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Tambahan Dukungan Partai Politik Pada Masa Jalanya Pemerintahan Joko Widodo Periode 2014-2019

No	Partai	Jumlah Kursi	Jumlah Persentase Suara
1	PDIP	109	18,95%
2	NASDEM	35	6,72%
3	PKB	47	9,04%
4	HANURA	16	5,26%
5	GOLKAR	91	14,75%
6	PAN	49	7,59%
7	PPP	39	6,53%
Jumlah		386	68,84%

Sumber: KPU, 2014

Dari tabel diatas setelah bergabungnya tiga partai menjadi pendukung pemerintahan Joko Widodo dimana terjadi perubahan suara yang signifikan dari sebelumnya yang tidak mencapai 50% plus 1 dukungan, berubah menjadi 68,84% dukungan artinya ketika pemerintahan Joko Widodo mengajukan program atau kebijakan di parlemen maka akan bisa mulus berjalan karena sudah memiliki suara mayoritas di parlemen, maka dari itu untuk mendapatkan dukungan maka Jokowi harus rela membagi kursi di kementerian, sejatinya partai-partai yang ditarik yang awalnya adalah oposisi pemerintahan tentu mengharapkan adanya *bargaining* posisi dan apa yang bisa ditawarkan oleh pemerintahan Joko Widodo untuk partainya, tentunya hal yang bisa ditawarkan Joko-Widodo adalah jabatan kursi di kementerian, sehingga dengan hal tersebut tidak adalagi yang namanya jargon koalisi ideologis dan yang ada adalah koalisi partai politik yang berbagi-bagi kekuasaan yang bermuara kepada pragmatisme yang dilakukan oleh partai-partai politik (Antonius Jeremias Beso, 2021), dimana KMP yang dibangun sebelumnya oleh partai-partai yang bukan pemenang pilpres hanya membentuk koalisi adalah untuk melawan pemerintah dengan menjadi oposisi yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan, sehingga pemerintah akan berupaya melobi partai-partai oposisi untuk dapat bergabung dengan pemerintahan tentunya dengan adanya tawaran kursi di kementerian sehingga berujung kepada pragmatisme partai politik yang mementingkan untuk dapat berbagi kekuasaan, sehingga Partai Golkar, PAN dan PPP yang pada awalnya adalah oposisi menjadi berbalik menjadi pendukung pemerintah dan mendapatkan jatah jabatan kursi di kementerian, dari peristiwa ini terlihat bahwa KMP yang dibangun tidak bertahan lama alias bubar, ketika muncul

tawaran bagi-bagi jabatan kementerian oleh pemerintah kepada partai politik (Adlin, 2015), hal ini dilakukan Jokowi adalah dalam rangka mendapatkan sokongan dari anggota DPR yang berasal anggota partai.

Menariknya, dengan adanya perubahan dukungan Partai GOLKAR yang awalnya berkoalisi dengan Prabowo dalam KMP, kemudian pada saat Partai GOLKAR ikut andil dalam pembentukan Kabinet Indonesia Kerja (KIK), akhirnya tetap berkoalisi dengan pemerintahan Joko Widodo, masa-masa ini terjadi ketika adanya dinamika dan pasca-konflik internal di Partai GOLKAR. Hasil pemilihan presiden 2014, Jokowi-Jusuf Kalla menjadi pemenang di bawah gerbong Koalisi Indonesia Hebat (KIH), sedangkan pasangan yang didukung Partai GOLKAR yang masuk dalam Koalisi Merah Putih (KMP), yaitu Prabowo-Hatta Rajasa, yang tidak menang telah membawa dampak bagi Golongan Karya. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran bagi partai besar seperti Partai GOLKAR, untuk mendapatkan kursi-kursi strategis di pemerintahan, sebagai bentuk perolehan kekuasaan yang Partai GOLKAR sebagai partai yang memiliki sejarah yang panjang dan berkuasa selama berdirinya negara Indonesia.

Bermula dari kepemimpinan ARB pada hasil MUNAS GOLKAR Tahun 2009 di Riau, dan berdasarkan hasil RAPIMNAS V Partai GOLKAR yang akhirnya memutuskan pelaksanaan MUNAS VIII akan diselenggarakan di Pekanbaru, Riau pada tanggal 4-7 Oktober tahun 2009, dan keputusan ini pun disampaikan langsung oleh Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR periode 2004-2009 kala itu.

Tahun 2014, merupakan momentum besar bagi Partai GOLKAR untuk menyelenggarakan MUNAS IX, maka DPP Partai GOLKAR telah mengetok palu dan menyelenggarakan MUNAS IX pada 30 November – 4 Desember di Bali pada tahun 2014. Penyelenggaraan MUNAS Bali dipimpin langsung oleh ARB, Idrus Marham sebagai Sekjend dan Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Akan tetapi, terpilihnya kembali ARB sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya digugat oleh para pengurus dan kader Golkar. Tepat dua hari setelah MUNAS Bali, Agung Laksono bersama sejumlah politisi Golongan Karya lainnya dan bersama Zainuddin Amali, membentuk Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG), kemudian menyelenggarakan MUNAS ANCOL pada 4-6 Desember 2014. Dalam Munas ini Agung Laksono terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya (Kompas, 2015). Dengan adanya dua versi Musyawarah Nasional tersebut, nampaknya terdapat kepengurusan ganda dalam Partai Golongan Karya. *Pertama*, versi hasil Musyawarah Nasional Bali dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan *kedua*, versi Munas Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono. Yang menarik kedua pengurus ini memiliki sikap yang berbeda: hasil MUNAS Bali tetap Golkar sebagai oposisi yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) bersama-sama dengan Gerindra, PKS, PAN, PPP, dan PBB. Sedangkan MUNAS Ancol menolak oposisi dan sepakat untuk bergabung dengan pemerintah bersama Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yaitu PDIP, PKB, Nasdem dan Hanura.

Konflik internal mereda ketika tercapai consensus dan sebagai bentuk rekonsiliasi bersama untuk mengadakan Munas Luar Biasa (MUNASLUB) di Nusa Dua Bali pada 16-17 Mei 2016. Pada Munas Luar Biasa ini terpilih Setya Novanto,

Ketua DPR RI pada masa itu, yang mendapatkan suara 277 suara, sehingga mengalahkan para pesaingnya yaitu Ade Komarudin yang sebanyak 173 suara, Aziz Syamsuddin 48 suara, Syahrul Yasin Limpo 27 suara, Airlangga Hartarto 14 suara, Mahyudin dengan 2 suara, kemudian dan Indra Bambang Utoyodan Priyo Budi Santoso dengan 1 suara. Pada akhirnya, walaupun terjadi konflik internal Partai GOLKAR dalam pertarungan kekuasaan sebagai Ketua Umum, siapapun Ketua Umum Partai GOLKAR akan tetap mendukung koalisi pemerintah, yang dimana pada saat itu adalah pemerintah Joko Widodo.

Ketertarikan penulis melihat dinamika konflik internal Partai GOLKAR pada tahun 2014, dengan adanya dua kubu hasil MUNAS Golkar ini yang juga memiliki perbedaan sikap politik dan koalisi. MUNAS Bali tetap memilih mendukung KMP, MUNAS Ancol memilih mendukung KIH. Dengan adanya perubahan dukungan dari Prabowo ke Jokowi sebagai pemenang Pilpres, tentu menjadi fenomena yang patut untuk diteliti. Maka dari itu, penulis ingin menganalisis dan menggali kedalaman informasi, mengapa terjadinya perubahan dukungan Partai GOLKAR dan apa saja faktor-faktor terjadinya perubahan dukungan Partai GOLKAR yang pada akhirnya ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Maka penulis akan melanjutkan penelitian dengan judul **“Perubahan Dukungan Partai Golongan Karya dari Prabowo ke Jokowi pada Tahun 2014-2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana model koalisi Partai Golongan Karya Pada Pilpres 2014 ?
2. Mengapa terjadi perubahan dukungan Partai Golongan Karya dari Prabowo ke Jokowi pada tahun 2014 – 2019 ?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi pendorong perubahan dukungan Partai Golongan Karya dari Prabowo ke Jokowi pada tahun 2014 – 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Akademik

1. Mengetahui bagaimana model koalisi Partai Golongan Karya pada Pilpres 2014.
2. Mengetahui mengapa terjadinya perubahan dukungan Partai Golongan Karya dari Prabowo ke Jokowi.
3. Mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab perubahan dukungan Partai Golongan Karya dari Prabowo ke Jokowi pada tahun 2014 – 2019.
4. Mengetahui model koalisi yang telah dibangun oleh Partai Golongan Karya, khususnya pada studi kepartaian dalam rangka dukungan pilpres dari gabungan partai politik.

1.3.2 Tujuan Praktis

1. Mengetahui pola-pola koalisi partai politik dengan terjadinya perubahan dukungan Partai Golongan Karya dari Prabowo ke Jokowi pada pemilihan Presiden tahun 2014.

2. Memperoleh hasil penelitian mengenai model koalisi partai politik di Indonesia pasca-reformasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Memperoleh hasil penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu politik, khususnya dalam studi partai politik di Indonesia.
2. Memperoleh hasil penelitian yang memberikan informasi kepada masyarakat dan publik mengenai dinamika koalisi partai politik di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat mengenai dinamika partai politik di Indonesia, yang dalam penelitian ini adalah Partai Golongan Karya sebagai partai yang besar dan bersejarah.
2. Meningkatkan pemahaman bagi para praktisi politik mengenai dampak konflik internal partai bagi tatanan demokrasi di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan membaginya ke dalam 5 bab yang saling berkaitan dan diuraikan secara sistematis, sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pembuka yang akan menguraikan pembahasan skripsi yang mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian yang selanjutnya sebagai bahan awal dengan menampilkan data primer yang didapati penulis dan dilakukan analisis terhadap data tersebut untuk mendapatkan rumusan masalah dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan sebagai alat dalam menganalisa. Penelitian ini menganalisis bagaimana koalisi partai politik dan juga memaparkan consensus serta konflik yang terjadi dalam internal Partai Golongan Karya sehingga berdampak kepada perubahan dukungan dan koalisi yang akhirnya ke pemerintahan Jokowi pada tahun 2014-2019. Pada bab ini akan menguraikan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh orang lain dan apa yang akan dilakukan oleh peneliti agar terlihat apa yang membedakan dengan penelitian yang sudah ada.

Adapun konsep dan teori yang digunakan yaitu berhubungan dengan koalisi dan konsensus konflik.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai metode yang digunakan dengan memakai metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu wawancara dan studi kepustakaan, teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, dan analisis data.

BAB IV PARTAI GOLONGAN KARYA PASCA-REFORMASI DALAM KOALISI PEMERINTAHAN DAN PILPRES

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa sub-bab yang mana peneliti akan menguraikan gambaran umum mengenai Partai Golongan Karya pasca-reformasi dalam pusaran koalisi pemerintah dan Pilpres sebagai objek penelitian.

BAB V PERUBAHAN DUKUNGAN PARTAI GOLONGAN KARYA DARI PRABOWO KE JOKOWI PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan menguraikan simpulan dan saran dari hasil penelitian penulis.

